

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 348 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal 17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dengan alasan :

1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
2. Izin pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami termasuk dalam izin usaha peternakan yang berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/-OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
3. Pengenaan retribusi berdasarkan persentase tertentu dari produksi bruto sarang burung walet tumpang tindih dengan pungutan pusat karena terhadap hasil produksi di habitat alami telah dikenakan PNBPN dan hasil produksi di hutan bukan alami telah dikenakan PPN.
4. Daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

KEDUA : Agar Bupati Pasaman menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember
2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Gubernur Sumatera Barat;
8. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman.

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional